

**Judul** : Cegah Penimbunan, Mendag Gandeng Satgas Pangan  
**Tanggal** : Kamis, 10 Maret 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

## Cegah Penimbunan, Mendag Gandeng Satgas Pangan

### Mendag: Kita Akan Sikat

datangi menjual sesuai HET. Meski barang yang dijual *supplier*-nya datang langsung Rp 10.500 per liter dari mobil tangki," ujar Lutfi.

Melihat masih ada persoalan harga yang tak sesuai dengan HET di Pasar Kebayoran Lama, Lutfi berencana akan memberikan spanduk kepada pedagang pasar tersebut yang bertuliskan harga minyak goreng curah dibanderol Rp 11.500/liter atau Rp 12.800/kg. Diharapkan dengan adanya spanduk tersebut, para pedagang pasar tidak bisa memainkan harganya lagi.

"Saya akan beri pedagang di sini spanduk yang ada keterangan harga HET supaya tidak lagi yang menjual di atas HET. Jadi masyarakat bisa memperoleh harga murah," beber Lutfi.

Menurut Lutfi, seharusnya tidak ada kelangkaan migor. Pasalnya jumlah migor yang disediakan sudah di atas kebutuhan masyarakat.

Dia menjelaskan, sejak penerapan *Domestik Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) per 14 Februari sampai 8 Maret 2022,

Kemendag telah menerbitkan 126 persetujuan ekspor kepada 54 eksportir, totalnya 2.771.294 ton. Rinciannya 1.240.248,6 ton untuk *RBD Palm Olein*, 385.907,5 ton untuk *RBD Palm Oil*, 153.411 ton untuk *RBD Palm Stearin*, serta 109.843 ton untuk CPO.

Hasilnya, jumlah DMO yang terpecah 573.890,84 ton atau 20,7 persen dari persetujuan ekspor, atau 463.886,04 ton untuk DMO *RBD Palm Olein*, dan 110.004,8 ton untuk DMO CPO. Adapun yang telah digelontorkan ke pasar, baik dalam bentuk curah maupun kemasan sebesar 415.787,81 ton atau sekitar 72,4 persen.

"Jumlah yang terdistribusi itu sudah melebihi perkiraan kebutuhan minyak goreng konsumsi rumah tangga dalam satu bulan yang hanya 327.321,15 ton," jelas Lutfi.

Dengan hitungan tersebut, harusnya migor untuk kebutuhan rumah tangga bukan lagi aman dan tersedia, melainkan berlimpah. Apalagi, Kemendag terus bekerja 24 jam *nonstop* untuk menyelesaikan sejumlah hambatan dalam pendistribusian secara nasional.

"Dengan distribusi sebanyak itu, bukan basah lagi. Tapi becek. Kalau masih ada kekeringan di sana-sini, berarti ada

gangguan. Ini rembes ke industri, padahal mereka tidak berhak. Bisa juga dijual secara ekspor. Semua tindakan di luar kebijakan adalah melawan hukum. Kita akan sikat," ancam Lutfi.

Menurut dia, migor murah ini untuk rakyat, jadi tidak boleh disalahgunakan, terutama oleh industri menengah dan industri besar. "Minyak goreng curah harus tetap diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), industri mikro dan kecil," tegasnya.

Kemendag bersama Satgas Pangan dan seluruh kementerian/lembaga akan menindak tegas oknum yang menghambat pasokan dan distribusi dengan cara menimbun, memainkan harga, serta tindakan yang melanggar ketentuan lainnya. Lutfi mengingatkan, pemerintah akan menindak tegas para oknum yang menghambat pasokan distribusi atau terbukti melakukan penimbunan minyak goreng.

"Kami tidak mau berandai-andai. Per hari ini, saya sudah koordinasi dengan Mabes Polri. Tidak boleh ada yang menyimpan minyak goreng. Saya sudah kasih semua alamat gudang penyimpanan, di mana tangkinya untuk kemudian dikroscek tim dari Mabes Polri," tegas Lutfi.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief

Prasetyo Adi yang ikut mendampingi Lutfi meninjau barang pokok, mengamininya. Dia mengatakan belum semua pedagang menetapkan harga minyak goreng curah sesuai HET. "Minyak goreng curah harusnya dijual Rp 11.500/liter atau Rp 12.800/kilogram tapi di pasar ini belum," kata Arief.

Arief berharap, seiring berjalannya waktu dan proses yang terus dilakukan, stok dan harga minyak goreng akan stabil hingga hari raya Idul Fitri. "Kita berharap, setelah ini, jelang puasa dan lebaran, stok dan harga minyak goreng akan stabil," pungkasnya.

Peneliti Indef, Sugiyono Madelen punya pendapat lain. Hitungannya, penggunaan CPO untuk migor jumlahnya terlalu sedikit. Paling banyak digunakan untuk nonpangan dan industri pengolahan. Karena itu persoalan migor dapat dipenuhi apabila alokasi penggunaan minyak sawit untuk migor diperbaiki.

"Bukan DMO migor yang merembes ke industri, melainkan alokasi minyak sawit yang merembes ke industri pengolahan, ekspor, dan terutama untuk nonmakanan yang jumlah alokasinya jauh lebih banyak dibandingkan untuk makanan (migor)," pungkasnya. ■ MEN